MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon: (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 3505193
Laman: *https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id*

SURAT TUGAS

Nomor : 55 /DjMT/Ratgas/KP.01.3/II/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka menerapkan standar layanan publik yang prima pada peradilan di satuan kerja Lingkungan Peradilan Militer maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi layanan peradilan secara berkala dan berkesinambungan menerapkan standar layanan publik yang prima pada peradilan di satuan kerja Lingkungan Peradilan Militer.

Dasar : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 131/DjMT/KEP/OT.1.3/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2023.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Nama Terlampir

Untuk :
1. Melaksanakan tugas untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan yang bertempat di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 8 sd. 10 Maret 2023;
2. Segala biaya dibebankan pada DIPA Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA-005.05.1.663122/2023 Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 November 2022;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2023

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Lulik Tri Cahyaningrum

Lampiran Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MA-RI
Nomor : 56 /DjMT/Ratgas/KP.01.3/II/2023
Tanggal : 17 Februari 2023

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN
1.	Kolonel Chk Muhaemin, S.H., M.H.	11970003240568	Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer
2.	Mayor CHK Heriyanto, S.H.	11060036660385	Kepala Seksi Mutasi Panitera Peradilan Militer
3.	Lamtur Pandapotan Simanullang, S.E., M.M.	197411132009121001	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim Peradilan Militer

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Lulik Tri Cahyaningrum